



RENCANA KERJA (RENJA)



2023

**SATPOL
PP
TAPANULI
SELATAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Sipirok,

2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19720603 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	39
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	68
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	70
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	87
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	89
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	91
3.3 Program dan Kegiatan	93
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	101
BAB V PENUTUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dokumen RKPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38) ;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;

30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022 Nomor 1128);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi dengan tetap berpedoman kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berpedoman kepada PP. Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai dasar gerak organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tahun 2023 sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Menyediakan bahan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2023.
2. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan.
3. Sebagai dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(a) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

(b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

(a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

(b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

(c) Penyediaan Alat Tulis Kantor

(d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- (e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- (f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - (d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
 - (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - (c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - (1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - (a) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah

Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

(b) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

(c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum

(d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

(e) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

(a) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

3. Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

(1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

(a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

(b) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berikut indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penegakan Perda (%)	52,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	4,87
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	70,00

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Misi OPD	Indikator Kinerja Utama	Program	Target IKU	Realisasi	Capaian
				2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Penegakan Perda (%)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50,00	21,05	42,11
2	Memberdayakan Polisi Pamong Praja yang profesional, transparan dan akuntabel menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75,00	50,00	66,67
3	Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4,69	1,84	39,26
4	Meningkatkan keamanan, ketertiban serta pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Daerah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,00	21,05	26,31

Keterangan :

1. Penegakan peraturan daerah

Indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Penegakan Perda ini yang memiliki target 50,00% dengan realisasi 21,05%. Dari 3 jumlah peraturan daerah yang ditangani oleh Satpol PP hanya 2 (satu) peraturan daerah yang tertangani selama tahun 2022 yaitu peraturan daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang operasi penyakit masyarakat dan peraturan daerah noor 17 tahun 2010 tentang retribusi daerah sedangkan peraturan daerah yang belum selesai yaitu peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Peningkatan kinerja ini akan terus dilakukan sehingga jumlah pelanggar Perda akan terus berkurang dan masyarakat benar-benar paham akan peraturan daerah. Peningkatan sosialisasi di setiap Kecamatan juga harus dilakukan. Dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan peningkatan penegakan peraturan daerah dan sosialisasi kedepannya sehingga meminimalisir pelanggar peraturan daerah.

Berikut rumus indikator penegakan perda dan data penegakan perda :

$$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{19} \times 100 = 21,05 \%$$

Berikut ini realisasi Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2022 disajikan dalam bentuk tabel dan berikut dokumentasi penegakan peraturan daerah:

NO	PERDA YANG DITEGAKKAN	KECAMATAN	SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)	TANGGAL SPT	KET
1	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Arse	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah smp negeri 2 arse	23 Juni 2022	
2	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Sipirok	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di	13 September 2022	
3	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Angkola Muaratais	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di kecamatan angkola	14 September 2022	
4	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Batang Toru	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di	15 September 2022	
5	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Muara Batang Toru	Dalam rangka monitoring bangunan tanpa IMB di kecamatan muara	16 September 2022	
6	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Angkola Sangkunur	Dalam Rangka membuka portal di kantor kecamatan angkola sangkunur	20 September 2022	✓
7	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Operasi Penyakit	Batang Angkola	Dalam rangka razia penyakit masyarakat (pekat) di kecamatan batang angkola	08 September 2022	✓
8	Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Operasi Penyakit	Angkola Selatan	Dalam rangka razia penyakit masyarakat (pekat) di kecamatan angkola selatan	23 September 2022	✓
9	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Sipirok	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	03 Oktober 2022	
10	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Batang Angkola	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	04 Oktober 2022	
11	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	05 Oktober 2022	
12	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Barat	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	06 Oktober 2022	
13	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Sayur Matinggi	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	07 Oktober 2022	
14	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	10 Oktober 2022	
15	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	Arse	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah smp negeri 2 arse	12 Oktober 2022	✓
16	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Selatan	Dalam rangka menindak lanjuti surat dari lurah aek pardomuan di kecamatan angkola	14 Oktober 2022	
17	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Marancar	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	19 Oktober 2022	
18	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Timur	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar	25 Oktober 2022	
19	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	Angkola Selatan	Dalam rangka monitoring penertiban baliho/iklan disekitar jalan nasional di	31 Oktober 2022	

2. Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

NO	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 2022	Jenis Pelanggaran	Perda yang ditegakkan	Ket
1	Dalam rangka menindaklanjuti lahan sekolah SMP Negeri 02 Arse	Ketertiban	Perda Nomor 17 Tahun 2010 (Retribusi Daerah)	✓
2	Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Lurah Di Kecamatan Angkola Selatan	Ketertiban	Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah	-

Dari tabel diatas Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) ada 2 (dua) pengaduan tentang Perda nomor 17 tahun 2010 dan Perda Nomor 16 tahun 2010. 1 (satu) Perda yang selesai dan 1 (satu) Perda yang belum selesai. Untuk pengaduan yang selesai yaitu sengketa tanah lapang SMP Negeri 2 Arse dimana masyarakat kelurahan Arse Nauli bersama-sama yang terdiri dari Camat Arse, Lurah Arse Nauli, Kepala Lingkungan yang terdiri dari 6 Kepala Lingkungan, Hatobangan beserta Satpol PP bersama-sama bergotong-royong membersihkan tanah lapang tersebut. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan terkendali. Pengaduan yang belum selesai yaitu mediasi oleh Kecamatan Angkola Sangkunur kepada saudara Ramlan Situmorang karena memportal jalan menuju Kantor Camat Angkola Sangkunur.

Indikator kinerja ini merupakan jumlah pengaduan dan ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP dengan target 75,00% dengan realisasi 50,00% dengan capaian kinerja 66,67%.

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah laporan K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{2} \times 100 = 50,00 \%$$

3. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten

Indikator kinerja ini mempunyai target 4,69 dengan realisasi hanya 1,84 dengan jumlah mobil sebanyak 3 unit sehingga capaian hanya 39,23%. Mobil pemadam kebakaran dibagi atas 3 sektor yaitu sektor Sipirok, Batang Toru, Sayurmatinggi. Tentunya armada mobil pemadam kebakaran masih minim. Kondisi saat ini mobil damkar

hanya ada 3 unit pada 3 kecamatan sementara ada 15 kecamatan jangkauan petugas damkar, kedepan diperlukan penambahan unit mobil sehingga proses penanggulangan penanganan kebakaran akan lebih mudah, penambahan fasilitas Emergency Call untuk petugas pemadam kebakaran juga sangat diperlukan agar penanganan kejadian kebakaran lebih cepat tanggap, perlunya sosialisasi tentang penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan resiko dan pencegahan bahaya kebakaran. perlunya penambahan sarana dan prasarana sehingga proses penanggulangan kebakaran akan maksimal. Berikut data kejadian kebakaran yang ditangani oleh petugas pemadam kebakaran beserta penjelasan rumus indikator cakupan pelayanan kebakaran :

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$= 1,84$$

Data Kejadian Kebakaran Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN 2022
1	Angkola Barat	1
2	Marancar	-
3	Batang Toru	3
4	Muara Batang Toru	-
5	Angkola Sangkunur	1
6	Batang Angkola	2
7	Sayur Matinggi	3
8	Tantom Angkola	-
9	Angkola Selatan	2
10	Angkola Timur	3
11	Sipirok	8
12	Arse	-
13	Sipirok Dolok Hole	1
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	2
Jumlah		26

Berikut ini data kejadian kebakaran tahun 2022 dan response time kebakaran

NO	BULAN / TAHUN	KECAMATAN	JENIS BENCANA	NAMA PEMILIK	TANGGAL KEJADIAN	RESPON TIME		KRONOLOGI	JUMLAH		TERDAMPAK						UPAYA YANG DILAKUKAN	TAKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	CAKUPAN PELAYANAN KEBAKARAN
						RT	TL		KELURAHAN	DESA	RUMAH/SAR			JIWA					
											RB	RS	RR	MD	LB	LR			
1	2	3	4		5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN MOBIL TRUCK FUSO	ABDI DLY 38 THN WIRUSAHA	07 JANUARI 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	KEL. PINTU PADANG	-	-	1	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 15 JUTA	0,04
2	JANUARI	BATANG TORU	KEBAKARAN SPRINGBED/ TEMPAT TIDUR	RIONI ENJULIA 47 THN PETANI	27 JANUARI 2022	√		ANTI NYAMUK	DUSUN SIPAINTE	HAPESONG BARU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 100 JUTA	0,08
3	FEBRUARI	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MAWANNI HSB	27 FEBRUARI 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	AEK BADAK JULU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 1 JUTA	0,06
4	MARET	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MANGOPUL 48 THN DAN SADRAK SIMANGUNSONG 38 THN	05 MARET 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	SUMANGGAL PARMONANGA N	2	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 125JUTA	0,06
5	MARET	SAYUR MATINGGI	KEBAKARAN RUMAH	MADONG SIHOTANG 42 THN	10 MARET 2022	√		KONSLETING LISTRIK	-	SILAYA JAE	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 50JUTA	0,06
6	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	29-Mar-22	√		REMBETAN PEMBAKARAN SAMPAH	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0,09
7	MARET	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	30 MARET 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0,09
8	APRIL	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	03 APRIL 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	DANO SITUMBA	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0,09
9	JUNI	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN KILANG PADI	-	23 JUNI 2022	√		REMBETAN BAKARAN AMPAS PADI	-	SORI MANAON	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0,03
10	JULI	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	UTCOK NAINGGOLAN 45 TAHUN	11 JULI 2022	√		KONSLETING LISTRIK	-	BATANG TORU	-	1	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 2 JUTA	0,08
11	JULI	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	-	28 JULI 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	KOMPLEK PERKANTORAN	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	-	0,09
12	AGUSTUS	ANGKOLA SANGKUNUR	KEBAKARAN RUMAH	BASRUN 56 TAHUN	09 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	TOKO PADANG	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	± Rp 115 JUTA	0,05
13	AGUSTUS	ANGKOLA SELATAN	KEBAKARAN RUMAH	HOTMAN SILABAN 37 TAHUN	12 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	TAPIAN NAULI	LK. III SUKA RAME	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	± Rp 35 JUTA	0,11
14	AGUSTUS	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	-	12 Agustus 2022	√		PUNTUNG ROKOK	PARGARUTAN	PARGARUTAN BATU	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0,05
15	AGUSTUS	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	PEMDA TAPSEL	13 Agustus 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	TOLANG	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI, MANGGALA AGNI DAN MASYARAKAT	-	0,05
16	AGUSTUS	BATANG ANGKOLA	KEBAKARAN RUMAH	JELITA 48 TAHUN	17 Agustus 2022		X	KONSLETING LISTRIK	PINTU PADANG	BATANG ANGKOLA	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 15 JUTA	0,04
17	AGUSTUS	ANGKOLA BARAT	KEBAKARAN RUMAH	AWALUDDIN SRG 33 TAHUN	22 Agustus 2022		X	BEKAS KAYU BAKAR	-	PANOBSAN DOLOK	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 60 JUTA	0,02
18	SEPTEMBER	SIPIROK	KEBAKARAN RUMAH	PANCARIAN RKT 48 TAHUN	08 September 2022	√		KONSLETING LISTRIK	-	SIPIROK	3	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 800 JUTA	0,09
19	SEPTEMBER	ANGKOLA TIMUR	KEBAKARAN LAHAN	-	08 September 2022		X	PUNTUNG ROKOK	-	PALSABOLAS	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0,05
20	SEPTEMBER	SIPIROK	KEBAKARAN LAHAN	PEMDA TAPSEL	20 September 2022		X	PUNTUNG ROKOK	-	TOLANG	-	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	-	0,09
21	SEPTEMBER	SAIPAR DOLOK HOLE	KEBAKARAN RUMAH	SARWEDI SMPANG	26 September 2022		X	KONSLETING LISTRIK	-	PURBA TUA	2	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR DAN DIBANTU PIHAK KEPOLISIAN, TNI DAN MASYARAKAT	± Rp 80 JUTA	0,12
22	OKTOBER	ANGKOLA MUARA TAIS	KEBAKARAN MOBIL TRUCK FUSO	BATARA	13 OKTOBER 2022	√		PUNTUNG ROKOK	-	GALANGGANG NASO MARRONGIT	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 500 JUTA	0,03
23	OKTOBER	SIPIROK	KEBAKARAN BENGKEL	ZUBIR HTS 50 THN	25 OKTOBER 2022	√		KONSLETING LISTRIK	HUTASUHUT	SIPIROK	-	-	1	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 1 JUTA	0,09
24	OKTOBER	SIPIROK	KEBAKARAN MOBIL MINI BUS	SOFYAN 34 THN	27 OKTOBER 2022	√		KONSLETING	-	SITUMBA JULU	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 40 JUTA	0,09
25	NOVEMBER	BATANG TORU	KEBAKARAN RUMAH	ILYAS LUBIS 42 TAHUN	10 NOVEMBER 2022	√		KONSLETING	-	SIPAINTE	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 100 JUTA	0,08
26	NOVEMBER	ANGKOLA SELATAN	KEBAKARAN RUMAH	IDAH IRIANI	24 November 2022		X	KONSLETING	-	PARDOMUAN	1	-	-	-	-	-	PEMADAMAN DENGAN MOBIL DAMKAR	± Rp 700 JUTA	0,11

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perka

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja SPM (Standar Pelayanan Minimal) dengan target kinerja 80,00% dimana dengan realisasi 21,05% sehingga capaian indikator kinerja 26,31%. indikator kinerja ini dihitung dari jumlah warga negara terkena dampak akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang memperoleh layanan dibagi jumlah warga negara yang terkena dampak dari penegakan hukum Perda

Indikator Pendukung

5. Rasio Polisi Pamong per 10.000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama Satpol PP yang mempunyai target 4,52 dimana realisasi 2,95. Indikator kinerja ini belum mencapai target karena jumlah keseluruhan anggota Satpol PP sebanyak 93 orang. Meningkatnya jumlah penduduk dengan 315.713 jiwa (sumber : BPS Tapsel).

Berikut rumus indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{93}{315713} \times 10000 = 2,95 \%$$

6. Rasio Linmas per 10,000 penduduk

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama dengan target 24,39 dengan realisasi 21,41 target belum terpenuhi. Disamping itu, perlunya perekrutan anggota Linmas kembali dan kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Linmas, minimnya minat masyarakat menjadi anggota linmas. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan melakukan sosialisasi ke setiap Kecamatan agar masyarakat dapat memahami fungsi Linmas yang sesungguhnya dan bergabung menjadi anggota Linmas.

Berikut rumus indikator dan data linmas di setiap Kecamatan :

$$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10000$$

$$\frac{676}{315713} \times 10000 = 21,41 \%$$

Data Jumlah Linmas di Tiap Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH LINMAS
1	Angkola Barat	51
2	Marancar	28
3	Batang Toru	59
4	Muara Batang Toru	28
5	Angkola Sangkunur	27
6	Batang Angkola	47
7	Sayur Matinggi	45
8	Tantom Angkola	39
9	Angkola Selatan	52
10	Angkola Timur	42
11	Sipirok	107
12	Arse	29
13	Sipirok Dolok Hole	46
14	Aek Bilah	37
15	Angkola Muara Tais	39
Jumlah		676

7. Cakupan patroli petugas Satpol PP

Indikator kinerja ini merupakan cakupan patroli petugas Satpol PP dengan target 27,78% dengan realisasi 53,33% dengan capaian kinerja 191,98%. Patroli Satpol PP selama satu tahun sebanyak 96 kali dengan target 180 kali selama satu tahun dengan satu kali per kecamatan setiap bulannya. Meningkatnya patroli dikarenakan meningkatnya pencegahan terjadinya inflasi harga bahan-bahan pokok. Hal ini menjadi tugas Satpol PP ikut andil dalam pencegahan inflasi demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Berikut rumus indikator dan data cakupan patroli Satpol PP :

Jumlah Patroli petugas Satpol PP dalam penyelesaian dan pemantauan dalam 24 jam

$$\frac{96}{180} \times 100 = 53,33 \%$$

Data Cakupan Patroli Petugas Satpol PP selama tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PATROLI 2022
1	Angkola Barat	3
2	Marancar	4
3	Batang Toru	11
4	Muara Batang Toru	5
5	Angkola Sangkunur	5
6	Batang Angkola	5
7	Sayur Matinggi	8
8	Tantom Angkola	5
9	Angkola Selatan	6
10	Angkola Timur	14
11	Sipirok	14
12	Arse	5
13	Sipirok Dolok Hole	5
14	Aek Bilah	-
15	Angkola Muara Tais	6
Jumlah		96

8. Jumlah Demonstrasi

Indikator ini mempunyai target 24 kali dengan realisasi 22 kali kejadian demonstrasi dengan capaian 91,67%. Selama tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi, dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain TNI dan Polri. Dengan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi selama tahun 2022 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindakan anarkis dari demonstran.

Berikut Rumus indikator jumlah demonstrasi :

Jumlah kejadian demonstrasi selama setahun

Sebanyak 22 kali kejadian demonstrasi yang ditangani oleh Satpol PP Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Data kejadian demonstrasi tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Aliansi / Tujuan
1	Pengamanan Demonstrasi	21 April 2022	Aliansi TRA-COSD (Dinas Kesehatan)
2		27 Mei 2022	Masyarakat aliansi dan transparansi anggaran (Dinas Pemdes)
3		27 Mei 2022	Aliansi aksi mahasiswa pemuda (Dinas Kesehatan)
4		02 Juni 2022	Masyarakat aliansi dan transparansi anggaran (Kepala Desa Kilang Papan)
5		02 Juni 2022	Aliansi Gemas (Inspektorat Tapsel & Sekretariat DPRD Tapsel)
6		04 Juni 2022	Aliansi Gerakan Anti Korupsi (Dinas Kominfo)
7		07 Juni 2022	Aliansi gerakan mahasiswa anti penindasan (Dinas Pendidikan)
8		09 Juni 2022	Aliansi aksi mahasiswa pemuda (Sekretariat DPRD Tapsel & Kajari Tapsel)
9		20 Juni 2022	Aliansi Gerakan Anti Korupsi (Sekretariat Daerah & Kajari Tapsel)
10		20 Juli 2022	Aliansi Mahasiswa Maju Bersama Rakyat (Dinas Kesehatan)

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Aliansi / Tujuan
11		01 Agustus 2022	Gerakan Mahasiswa Bawah Tangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan)
12		02 Agustus 2022	Aliansi Mahasiswa Maju Bersama Rakyat (Dinas Perkim)
13		04 Agustus 2022	Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (Aliansi Pemuda Tapanuli Selatan (Kantor Bupati dan DPR Tapanuli Selatan)
14		04 Agustus 2022	Aliansi Pemuda Tapanuli Selatan Bersatu (Kantor Bupati dan DPR Tapanuli Selatan)
15		08 Agustus 2022	Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Kejari Tapanuli Selatan)
16		09 Agustus 2022	Aliansi Masyarakat Maju Bersama Rakyat (Kantor Bupati, Dinas PUPR, DPRD Tapanuli Selatan)
17		25 Oktober 2022	Demonstrasi ke Karang Taruna Tapsel dan Depan Kantor Bupati Lama Jalan Kenanga
18		27 Oktober 2022	Demonstrasi di Kejari Tapsel, Sipirok
19		14 Desember 2022	Demonstrasi ke Depan Kantor Bupati Tapsel, Depan Kantor Kejaksaan Tapsel dan Depan Kantor Perkim Tapsel
20		20 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel, Kantor Kejari Tapsel, dan Kantor Pendudukan dan Keluarga Berencana
21		21 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel, dan Kantor DPRD Tapsel
22		30 Desember 2022	Demonstrasi di Kantor Bupati Tapsel

*Sumber : Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD
dan Pencapaian Renstra Satpol PP S/D Tahun 2021 (Tahun berjalan) Kabupaten Tapanuli
Selatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisas i (n-2)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	100	100	91	91,00	100	100	100
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Renstra (dokumen)	37	6	8	8	100,00	6	20	54,05
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS (Bulan)	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00. 05.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya hari ulang tahun Republik Indonesia, terlaksananya pameran pembangunan OPD	12	0	1	1	100,00	2	3	25,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dalam rangka HUT Tapsel (Kali)								
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (stel)	834	30	161	161	100,00	142	333	39,93
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen alat-alat Listrik (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (OH)	11450	2652	2808	2531	90,14	2713	7896	68,96
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	0	0	0	0	0	1	1	0,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)	42	0	1	1	100,00	22	23	54,76
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat-menyurat SKPD (bulan)	12	0	12	12	100,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (bulan)	12	12	12	12	100,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor dalam kondisi baik (bulan)	12	12	12	6	50,00	12	12	100,00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/rumah dinas pemerintahan kabupaten tapanuli selatan (orang)	678	111	113	110	97,35	113	334	49,26
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Roda 6 : 4 unit, Roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 8 unit (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	12	12	12	9	75,00	12	12	100,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Satpol PP (Unit)	5	0	0	0	0,00	1	1	20,00
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda (%)	75	33,33	75	50	66,67	75	112,50	1,50
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	7,84	4,93	3,52	3,44	97,73	4,52	12,89	1,64

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	23,64	23,98	24,22	23,98	99,01	24,39	72,35	3,06
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	36,67	100	25,56	61,67	61,67	24	185,67	5,06
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Kertibian Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Kertibian Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar (kali)	1275	90	188	198	105,32	291	579	45,41
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertibian Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan (kali)	144	24	24	3	12,50	207	234	162,50

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan (orang)	958	82	113	108	95,58	270	460	48,02
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (orang)	432	60	71	71	100,00	71	202	46,76
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan (orang)	260	77	733	372	50,75	200	649	249,62
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat),	288	3	48	9	18,75	48	60	20,83

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	dan Pelanggaran Perda (Kali)								
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	0,001	0,005	0,001	20,00	0,005	0,001	20
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01.02	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan (Orang)	293	0	0	0	0,00	610	610	208,19
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Unit)	0	0	0	0	0	1	1	0
1.05.1.05.5.02.0.00.05.00.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah petugas terlatih dalam	205	48	48	39	81,25	39	126	61,46

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentsra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2022	
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pemadam kebakaran (orang)								

Penjelasan Tabel :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada bidang administrasi perkantoran. Target pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan Realisasi dari Program ini adalah 91,00%.

Dimana dari 19 sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencapai 100% ada 11 sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bertujuan untuk penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, P. Renja, RKA, RKA.P, Renstra dengan capaian 100% dana terserap dengan baik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN bertujuan untuk Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS selama 1 tahun dengan realisasi 100% sesuai kebutuhan pegawai yang ada.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN bertujuan untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan terlaksananya pameran pembangunan OPD dalam rangka HUT Tapsel dengan realisasi 100% dengan terlaksananya kegiatan HUT RI dan HUT Tapsel.

- d. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bertujuan untuk pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan terpenuhinya pengadaan pakaian dinas untuk semua personil dengan realisasi 100%.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertujuan untuk tersedianya komponen alat-alat listrik kantor dengan realisasi 75%.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bertujuan untuk Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor dengan realisasi 75%.
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertujuan Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) dengan realisasi 75%
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kantor dengan realisasi 75%.
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk tersedianya surat kabar dengan realisasi 75%.
- j. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD bertujuan untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam

daerah dan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi 90,14%

- k. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya bertujuan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi 100%
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertujuan agar terpenuhinya jasa surat-menyurat SKPD dengan realisasi 100%
- m. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bertujuan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi dengan realisasi 100%.
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bertujuan untuk Peralatan Kantor dalam kondisi baik dengan realisasi 50,00%
- o. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor bertujuan untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan instansi/rumah dinas pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan realisasi 97,35%
- p. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertujuan untuk

Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Roda 6 : 4 unit, Roda 4 : 5 unit, Roda 2 : 8 unit dengan realisasi 75,00%.

q. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya bertujuan untuk Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi 75,00%

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat dan mewujudkan suasana dan kondisi aman, nyaman, tentram, dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah

a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan bertujuan untuk Jumlah Pelaksanaan patroli dan Pam Lebaran, hari-hari besar dengan realisasi 105,32%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota bertujuan untuk Jumlah pelaksanaan razia terpadu bersama TNI/POLRI dan kejaksaan dengan realisasi 12,50%.

- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk penyuluhan dan pembinaan anggota linmas di Kecamatan dengan realisasi 95,58%.
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia dengan realisasi 100%.
 - e. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk Jumlah peserta sosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan dan tehnik pencegahan dengan realisasi 50,75%.
 - f. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota bertujuan untuk Terselenggaranya razia penyakit masyarakat (Pekat), dan Pelanggaran Perda dengan realisasi 18,75%.
3. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan bahaya kebakaran dan memberikan pelayanan prima khususnya di bidang kebakaran. Target dari program ini adalah 0,004 (sesuai RPJMD) dan terealisasi 0,001 dengan capaian dari Program ini adalah 25%

- a. Sub Kegiatan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk Terlaksananya Pengendalian, Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan realisasi 81,25%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan.

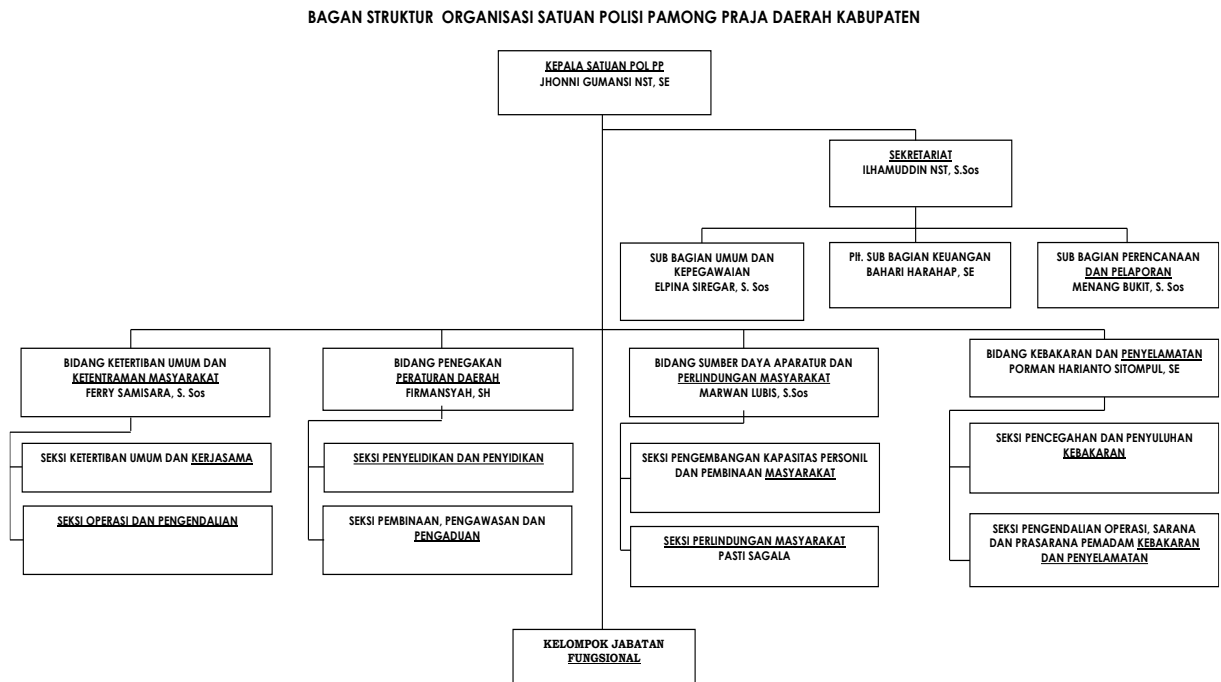
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten adalah Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat Satuan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama;
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten dapat dilihat dibawah ini :



Daftar absen Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Jhonni Gumansi Nasution, SE	19720603 200312 1 004	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli
2	Ilhamuddin Nasution, S.Sos	19720623 199503 1 001	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Tapanuli Selatan
3	Ferry Samisara, S. Sos	19720403 199203 1 003	Kabid Ketertiban umum dan ketentraman
4	Firmansyah, SH	1973010 199803 1 006	Kabid Penegakan Peraturan Daerah
5	Porman Harianto Sitompul, SE	19741205 199402 1 001	Kabid Kebakaran dan Penyelamatan
6	Mardin L. Pautan Said, S.sos	19641208 198602 1 001	Kabid Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
7	Menang Bukit, S. Sos	19700421 199403 1 001	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
8	Elpina Siregar, S. Sos	19770316 199703 2 001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Pasti Sagala	19661011 199103 2 003	Kasi Perlindungan Masyarakat
10	Bahari Harahap, SE	19820402 200801 1 003	Plt. Kasubbag Keuangan
11	Sahrul Efendi	19650703 200604 1 001	Pembantu Bendahara
12	Samaruddin Harahap	19660523 200604 1 002	Fungsional Umum
13	Kosma Jamas Harahap	19810129 200604 1 009	Pembantu Bendahara
14	Lampogogo Hadengganan	19820220 200701 1 006	Bendahara Pengeluaran
15	Ngatiman	19810906 200904 1 002	Pembantu Bendahara
16	M. Ridoan Dalimunthe	19790812 200701 1 005	Pengurus Barang
17	Purba	19650321 200604 1 002	Fungsional Umum
18	Syahrul Hutasuhut	19700305 200604 1 007	Fungsional Umum
19	Muhammad Arif	19690427 200604 1 004	Fungsional Umum
20	Abdi Alamsyah	19790101 200604 1 023	Komandan Provost
21	Ali Muksin	19701115 200701 1 004	Anggota
22	Syarif Hidayat Dalimunthe	19790712 200604 1 009	Intel
23	Zebri Sikumbang	19800106 200904 1 005	Intel
24	Hisar Siregar	19710827 200604 1 003	Intel
25	ABDURROHMAN HARAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
26	ABDULLAH ROSIDIN	-	Tenaga Harian Lepas
27	AFANDY AHMAD SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
28	AHMAD FAHMI	-	Tenaga Harian Lepas
29	AHMAD YUSUF	-	Tenaga Harian Lepas
30	AHMAD ZUHRI	-	Tenaga Harian Lepas

NO	NAMA	NIP	JABATAN
31	ALEK SANDER PULUNGAN	-	Tenaga Harian Lepas
32	ALI MARZUKI SIMAMORA	-	Tenaga Harian Lepas
33	ALINUDDIN NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
34	ANDERSEN RITONGA	-	Tenaga Harian Lepas
35	ANDE AFRIZAL HUTAS UHUT	-	Tenaga Harian Lepas
36	ARI AULIA RAMADAN	-	Tenaga Harian Lepas
37	ASRUL TOPAN DALIMUNTHE	-	Tenaga Harian Lepas
38	AZHARI FADHILAH	-	Tenaga Harian Lepas
39	DARUSSALAM	-	Tenaga Harian Lepas
40	DERLIANA PORMARITO SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
41	DIRMAN SYAH	-	Tenaga Harian Lepas
42	EDI SYAPUTRA	-	Tenaga Harian Lepas
43	ENNY LAURA RISNAWATY	-	Tenaga Harian Lepas
44	EVA KARTIKA	-	Tenaga Harian Lepas
45	FITRAH YASSER KUDUS PANJAITAN	-	Tenaga Harian Lepas
46	FITRIADI	-	Tenaga Harian Lepas
47	HARKAR	-	Tenaga Harian Lepas
48	HARI SANDI HARAHAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
49	HERI PARLAGUTAN	-	Tenaga Harian Lepas
50	HENDRA MAHENDRA	-	Tenaga Harian Lepas
51	HERMAN NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
52	IKA RAHMAWATY	-	Tenaga Harian Lepas
53	ILHAM SOANGKUPON	-	Tenaga Harian Lepas
54	IMAM MUNANDAR HARAHAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
55	IRWAN HALOMOAN SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
56	IQMAL PARANGINAN SIMATUPANG	-	Tenaga Harian Lepas
57	JABAL NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
58	KHOIRUL IHSAN	-	Tenaga Harian Lepas
59	MAULID MANSYAH NEGARA HARAHAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
60	MEIN ASRAWI GULTOM	-	Tenaga Harian Lepas
61	MUHAMMAD SALEH RANGKUTI	-	Tenaga Harian Lepas
62	MUHAMMAD SOFYAN DASOPANG	-	Tenaga Harian Lepas
63	MUKMIN SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
64	MUTIA LIZA INDRIANI	-	Tenaga Harian Lepas
65	MORA SUALOAN	-	Tenaga Harian Lepas
66	PANUSUNAN ADEK SAPUTRA RITONGA	-	Tenaga Harian Lepas
67	RAHMAT HIDAYAT	-	Tenaga Harian Lepas
68	RAI HAMDANI	-	Tenaga Harian Lepas

NO	NAMA	NIP	JABATAN
69	RANUDDIN	-	Tenaga Harian Lepas
70	REZA FAHLEVI PULUNGAN	-	Tenaga Harian Lepas
71	RIEZKI JULI ASTUTI RITONGA	-	Tenaga Harian Lepas
72	RIKO MULYADI	-	Tenaga Harian Lepas
73	RISKAL HARAHAH	-	Tenaga Harian Lepas
74	RIZKI ADINDA HARAHAH	-	Tenaga Harian Lepas
75	RIZKI AFANDI PRATAMA MANIK	-	Tenaga Harian Lepas
76	ROHADI SIMANJUNTAK	-	Tenaga Harian Lepas
77	ROIHAN HARIANJA	-	Tenaga Harian Lepas
78	SAHDAM	-	Tenaga Harian Lepas
79	SAHLAN PANE	-	Tenaga Harian Lepas
80	SAHRIAL BATUBARA	-	Tenaga Harian Lepas
81	SARMADAN HARAHAH	-	Tenaga Harian Lepas
82	SEM DENPRI SIMANUNGKALIT	-	Tenaga Harian Lepas
83	SOFYANANDA PG NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
84	SRI RAHAYU	-	Tenaga Harian Lepas
85	SUPRIADI NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
86	SUSENO HARAHAH	-	Tenaga Harian Lepas
87	SYAFRI ANANDA	-	Tenaga Harian Lepas
88	SYAFRUDDIN SINAGA	-	Tenaga Harian Lepas
89	UMAR ARDIANSYAH	-	Tenaga Harian Lepas
90	YUSUF HADAMEAN RAMBE	-	Tenaga Harian Lepas
91	WAHYU AJI	-	Tenaga Harian Lepas
92	YUDHI ADITYA DHARMA	-	Tenaga Harian Lepas
93	ZULIAN MANATA CHALIK LUBIS	-	Tenaga Harian Lepas
94	ZULKIFLI MELAYU	-	Tenaga Harian Lepas
95	ABD. HADI SIPAHUTAR	-	Tenaga Harian Lepas
96	ADEK RIZKY	-	Tenaga Harian Lepas
97	ABDUL AJIS NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
98	ABDUL AZIZ RAMBE	-	Tenaga Harian Lepas
99	ADI KURNIA RAMBE	-	Tenaga Harian Lepas
100	AHMAD FAUZI NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
101	AHMAD RIDWAN PULUNGAN	-	Tenaga Harian Lepas
102	AHMAD RIVAI	-	Tenaga Harian Lepas
103	AHMAD YANI	-	Tenaga Harian Lepas
104	ALI MUHAJIR SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas

NO	NAMA	NIP	JABATAN
105	ANTON BARITA SYAHPUTRA SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
106	B. SYAHPUTRA HARAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
107	BACHRI HARUN SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
108	DEWI DIA SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
109	DEDEH MILKA	-	Tenaga Harian Lepas
110	ELSAH SAFITRI	-	Tenaga Harian Lepas
111	HARIS MARTUA HUTASUHUT	-	Tenaga Harian Lepas
112	HERYSON HASIBUAN	-	Tenaga Harian Lepas
113	ILHAM KHOIRI RAMBE	-	Tenaga Harian Lepas
114	IRHAM TUMANGGOR	-	Tenaga Harian Lepas
115	ISKANDAR ABDULLAH	-	Tenaga Harian Lepas
116	JONNER LUDIK BAIK	-	Tenaga Harian Lepas
117	JULI SYAHPUTRA	-	Tenaga Harian Lepas
118	JUPRIADI	-	Tenaga Harian Lepas
119	MANGARANAP LUMBAN TOBING	-	Tenaga Harian Lepas
120	MUSTOFA HUSEIN	-	Tenaga Harian Lepas
121	NURIJA SIREGAR	-	Tenaga Harian Lepas
122	RAHMAT HABIB NASUTION	-	Tenaga Harian Lepas
123	RAJA SANDE TUA SITOMPUL	-	Tenaga Harian Lepas
124	RIDMAN AFANDI	-	Tenaga Harian Lepas
125	RISKI GUNAWAN PULUNGAN	-	Tenaga Harian Lepas
126	RIZKI RANDA	-	Tenaga Harian Lepas
127	ROBIN HERIANTO HUTAPEA	-	Tenaga Harian Lepas
128	SAFLI ALFANDI SIAGIAN	-	Tenaga Harian Lepas
129	SAHMAD DARWIS	-	Tenaga Harian Lepas
130	SURYA DARMA	-	Tenaga Harian Lepas
131	SUKIAN PERKASA HARAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
132	SYAHRUL RAMBE	-	Tenaga Harian Lepas
133	TAMPAN HARAHAP	-	Tenaga Harian Lepas
134	TAUFIK HAMDANI HUTASUHUT	-	Tenaga Harian Lepas

c. Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Satuan

(1) Sekretaris Satuan mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;

(2) Sekretaris Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan;

- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/aset;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Keuangan, Akuntansi, Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan satuan polisi pamong praja;
 - c. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja satuan polisi pamong praja;
 - d. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
 - e. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - f. melaksanakan akuntansi keuangan satuan polisi pamong praja;
 - g. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - h. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawan lingkup satuan polisi pamong praja;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan satuan polisi pamong praja; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

2.c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) satuan polisi pamong praja;
 - b. melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - h. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satpol PP terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas, menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. menyiapkan perencanaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
 - h. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
- l. pelaksanaan kerja sama teknis dengan perwakilan daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.a. Seksi Ketertiban Umum Dan Kerja Sama

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;
- (2) Seksi Ketertiban umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan kerja sama;

- b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala massal;
- e. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan pengawalan pejabat dan/atau tamu urusan daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- i. melaksanakan kerja sama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- j. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan kerja sama;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan kerja sama; dan

- l. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.b. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian;
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi;
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang operasi dan pengendalian;
 - c. melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. melaksanakan patroli ketentraman dan ketertiban umum, terutama diwilayah perkantoran, area perkantoran dan kompleks rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. menertibkan pedagang dan pemasang reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - f. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait;

- h. melaksanakan pengamanan/pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
- i. melaksanakan pengawalan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
- j. melaksanakan pengamanan kantor/aset/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten;
- k. membantu pengamanan dan pengawala tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan bekerja sama dengan instansi terkait;
- m. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. menyiapkan perencanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. menyusun prosedur tahap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan/atau instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyelidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - f. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/istansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk mengatur pedoman dan petunjuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan terhadap penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk penanganan pengaduan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah lainnya;

- f. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
- h. melaksanakan administrasi dinas di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

(2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. menyiapkan perencanaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat dan petugas pemadam kebakaran;

- d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta petugas pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan dasar;
- f. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- g. pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- h. melaksanakan pendataan potensi perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- j. membina dan menggerakkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- k. menggerakkan dan mengarahkan satuan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah mengenai pengawasan TPS oleh perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum;

- m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan administrasi dinas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5.a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat;
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;
 - c. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar/teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Petugas Pemadam Kebakaran dan PPNS;

- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi dinas di bidang pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.b. Seksi Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat;

- c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan pembentukan satuan tugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan administrasi dinas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Bidang Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran dan penyelamatan;

- b. menyiapkan perencanaan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis, pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
- e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran;
- f. pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana/kebakaran;
- g. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
- h. pelaksanaan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- i. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyebab kebakaran;
- j. pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadinya bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- l. pelaksanaan upaya rehabilitas dan rekonstruksi serta pemenuhan utilitas dasar paska bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dinas/instansi terkait dalam rangka rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana;

- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6.a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran melalui media brosur dan spanduk;
 - d. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelatihan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
- i. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.b. Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Pengendalian Operasi, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. melaksanakan operasi penanggulangan pemadam kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan operasi penyelamatan pemadam kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya, pada saat terjadi bencana;
- e. melakukan evaluasi korban kebakaran, bencana alam dan bencana lainnya ke tempat yang aman;
- f. melakukan penyelidikan dan penelitian sebab dan akibat kebakaran;
- g. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam upaya-upaya rehabilitas dan rekonstruksi, serta pemenuhan utilitas dasar pasca bencana;
- h. pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pergudangan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian operasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja
Pelayanan Satpol PP Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan
s/d tahun 2022

NO	Indikator	SPM/stand ar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penegakan Perda (%)			50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	21,05	37,50			
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)			75,00	80,00	81,00	85,00	87,00	50,00	73,68			
3	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten			4,69	4,87	4,87	4,87	5,49	1,84	0,23			
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	SPM		80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	21,05	37,50			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah. Sebagai unsur penyelenggaraan Trantibum pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dengan Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan terkait permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan izin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Karena pada hakikatnya, "Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat" sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Kekuatan dan Kelemahan

➤ **Kekuatan (Strengthness) :**

- a. Kompetensi personil
- b. Jumlah sarana pendukung operasional
- c. Inovasi dalam sistema dan mekanisme kerja
- d. Kewenangan penindakan dalam pelanggaran peraturan daerah

➤ **Kelemahan (Weakness) :**

- a. Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penertiban
- b. Jumlah personil
- c. Legalitas SOP penegakan Peraturan Daerah

Peluang dan Tantangan

➤ **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya dukungan dari atasan dalam peningkatan kinerja Kecamatan
- b. Dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda
- c. Dukungan perangkat daerah terkait dan trantib di kecamatan
- d. Dinamika peraturan perundang-undangan dalam peningkatan kompetensi SDM

➤ **Tantangan (Threat)**

- a. Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda
- b. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda
- c. Intervensi terjadinya pelanggaran Perda
- d. Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, bangunan liar

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, dengan arahan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan terkait program prioritas dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan atas penyusunan rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023, terdapat masih mengadopsi program dan kegiatan tahun berjalan untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan ada beberapa target dan tolak ukur yang harus diubah karena kurang sesuai. Telaah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	6.453.843.555	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100	6.453.843.555	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6	17.391.800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6	17.391.800	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordina dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	17.391.800	Koordina dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	17.391.800	
Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	2.608.767.556	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	2.608.767.556	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	322	2.524.967.556	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	322	2.524.967.556	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	83.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1	83.800.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6	239.523.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	6	239.523.800	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	3.394.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1	3.394.500	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.022.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.022.200	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik (Paket)	1	32.656.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik (Paket)	1	32.656.300	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	16.736.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1	16.736.800	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	6.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan (Dokumen)	1	6.100.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1618	173.614.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1618	173.614.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	4	3.422.410.399	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	4	3.422.410.399	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	772.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	772.500	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	31.918.859	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	31.918.859	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							yang Disediakan (Laporan)			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.752.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.752.800	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1535	3.383.966.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1535	3.383.966.240	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Satpol PP	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	2	165.750.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Satpol PP	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	2	165.750.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemerintah Daerah					Urusan Pemerintah Daerah		kantor (Kegiatan)			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	16.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	16.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	149.750.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	149.750.000	
Program Peningkatan	Satpol PP	Penegakan Perda (%)	75	158.814.000	Program Peningkatan	Satpol PP	Penegakan Perda (%)	75	158.814.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)	100		Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)	100		
		Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	5,47				Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	5,47		
		Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	24,45				Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk	24,45		
		Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	30				Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)	30		
		Jumlah Demonstasi (Kali)	25				Jumlah Demonstasi (Kali)	25		

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	5	92.364.000	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	5	92.364.000	
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kasus)	190	16.650.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	190	16.650.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pengawasan (Kasus)			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	17.850.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	17.850.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	1	17.850.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	1	17.850.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Umum (Dokumen)					Umum (Dokumen)			
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	75	23.064.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	75	23.064.000	
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	16.950.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	1	16.950.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kejahatan (Dokumen)			
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	1	66.450.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	1	66.450.000	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota (Laporan)	443	66.450.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota (Laporan)	443	66.450.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	30.102.000	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	0,005	30.102.000	
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	2	30.102.000	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	2	30.102.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	17.550.000	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	17.550.000	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	40	12.552.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	40	12.552.000	

RENCANA KERJA (RENJA)	2023
-----------------------	------

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH				6.642.759.555					6.642.759.555	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Hasil pengelolaan data berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai implementasi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan pengelolaan data berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (SIPD Kemendagri). Salah satu fitur dalam SIPD Kemendagri adalah penyampaian usulan kegiatan dari seluruh Pemangku Kepentingan pembangunan kepada Perangkat Daerah, baik berupa usulan langsung (aspirasi) maupun usulan reses (Pokok-Pokok Pikiran DPRD).

Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Daerah tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui SIPD .

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah (Satpol PP) Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pelaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan Peraturan tentang Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP yaitu Menegakkan Perda dan Perkada, Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top

down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 yaitu : "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" pembangunan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal Kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Tingkat Kemiskinan
3. Tingkat Pengangguran Terbuka
4. Nilai Tukar Nelayan
5. Ratio Gini
6. Indeks pembangunan manusia
7. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Nilai Tukar Petani (NTP)
9. Nilai Tukar Nelayan

Sesuai tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berfokus pada untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Publik dengan Sasaran: Meningkatkan pelayanan ketertiban dan Keamanan kepada masyarakat melalui peningkatan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah ditetapkan pada Satpol PP Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat :

- 1) Penegakan Peraturan Daerah

- 2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
- 3) Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten
- 4) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada

Tabel. 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi		Target	
				2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Penegakan Perda (%)	50,00	21,05	52,00	54,00
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100,00	50,00	80,00	81,00
		Meningkatnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100,00	50,00	80,00	81,00
	Meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	50,00	21,05	70,00	60,00

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan menjadi bahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Misi Ke-5 Kabupaten Tapanuli Selatan yakni meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah masih menunjukkan pencapaian yang belum optimal sehingga diperlukan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mendorong ketercapaian terhadap pencapaian sasaran pada misi ke 3 Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
A.	Kabupaten / Kota KABUPATEN TAPANULI SELATAN				0.00%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	281.933	0	0	0%
	2 . warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	281.933	0	0	0%
2 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Penegakan Perda sesuai SOP	3	2	1	0%
	2 . Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	3	2	1	0%
	3 . Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	3	2	1	0%
3 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0%
	3 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0%
	4 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0%
	5 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
4 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0	0%
5 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0	0%
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	0	0	0	0%
	3 . Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	0	0	0	0%
	4 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0	0%
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	0	0%
	6 . Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	0%
6 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	1 . Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	15 Kecamatan	0 Kecamatan	15 Kecamatan	0%
	2 . Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0%

3.1.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tapanuli Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) program 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.1

Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Satpol PP	7.103.580.554	DAU
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	17.391.800	DAU
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	17.391.800	DAU
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Satpol PP	2.472.285.498	DAU
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	2.447.285.498	DAU
1.2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol PP	25.000.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	158.400.000	DAU
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	158.400.000	DAU
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	486.279.300	DAU
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	4.412.800	DAU
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	7.022.200	DAU
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	32.656.300	DAU
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	21.020.000	DAU
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Satpol PP	11.000.000	DAU
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	410.168.000	DAU
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Satpol PP	87.101.000	DAU
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	87.101.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	3.544.842.956	DAU
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	772.500	DAU
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	32.041.336	DAU
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	11.505.600	DAU
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	3.500.523.520	DAU
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	337.280.000	DAU
1.71	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	16.000.000	DAU
1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Satpol PP	321.280.000	DAU
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	195.326.400	DAU
2.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	169.826.400	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2.1.2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	55.358.400	DAU
2.1.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansah Hak Asasi Manusia	Satpol PP	37.968.000	DAU
2.1.6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Satpol PP	25.500.000	DAU

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	PAGU (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
2.2.1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
3	Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	38.052.000	DAU
3.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	38.052.000	DAU
3.1.1	Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	25.500.000	DAU
3.1.2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	12.552.000	DAU
TOTAL			7.336.958.954	

3.1.3. Penjelasan Rumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD

Tidak terdapat perbedaan renja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Dengan rancangan awal renja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan lokasi, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	7.103.580.554	APBD		100	7.218.768.533
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	17.391.800	APBD		6	17.624.850
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	17.391.800	APBD		6	17.624.850
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	2.472.285.498	APBD		1	2.505.414.124

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	322	2.447.285.498	APBD		322	2.480.079.124
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.000.000	APBD		1	25.335.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	158.400.000	APBD		1	180.522.560
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	158.400.000	APBD		1	180.522.560
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penataan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	6	486.279.300	APBD		6	492.795.442
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	4.412.800	APBD		1	4.471.932
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	7.022.200	APBD		1	7.116.297

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	32.656.300	APBD		1	33.093.894
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	21.020.000	APBD		1	21.301.668
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	11.000.000	APBD		1	11.147.400
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1618	410.168.000	APBD		3300	415.664.251
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Perkantoran yang berkualitas (kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	87.101.000	APBD			88.268.153
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	126	87.101.000	APBD			88.268.153
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	4	3.544.842.956	APBD		4	3.592.343.852

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	772.500	APBD		1	782.852
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	3	32.041.336	APBD		3	32.470.690
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	11.505.600	APBD		1	11.659.775
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1535	3.500.523.520	APBD		1535	3.547.430.535
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	337.280.000	APBD		2	341.799.552
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	18	16.000.000	APBD		18	16.214.400

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (unit)	Kabupaten Tapanuli Selatan	10	321.280.000	APBD		10	325.585.152
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	75,00	195.326.400	APBD		75,00	197.943.774
						Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Tertangani (%)		100,00				100,00	
						Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		5,47				6,36	
						Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk		24,45				24,37	
						Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (%)		30,00				32,22	
						Jumlah Kejadian Demonstrasi (Kali)		25,00				22,00	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tapanuli Selatan (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	5	169.826.400			5	172.102.074

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (kasus)	Kabupaten Tapanuli Selatan	190	55.358.400	APBD		190	56.100.203
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD		1	25.841.700
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD		1	25.841.700

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	75	37.968.000	APBD		75	38.476.771
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan (dokumen)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD		1	25.841.700
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD		1	25.841.700
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	443	25.500.000	APBD		174	25.841.700

Kode					Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten (%)	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,005	38.052.000	APBD		0,005	38.561.897
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayadan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten (Kegiatan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	2	38.052.000	APBD		2	38.561.897
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	25.500.000	APBD		1	25.841.700
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran (Orang)	Kabupaten Tapanuli Selatan	40	12.552.000	APBD		40	12.720.197

RENCANA KERJA (RENJA)	2023
-----------------------	------

Kode	Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH				APBD	7.336.958.954			APBD	7.455.274.204

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan penyusunan awal Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan suatu langkah-langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Sipirok, 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

JHONNI GUMANSI NASUTION, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19720603 200312 1 004